

**LEGALITAS HASIL MEDIASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG  
PANJANG NOMOR 0151/Pdt.G/2015/PA.PP DAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)**

**SKRIPSI**

|

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Prodi Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

**AHMAD ALEFZA**

**1313010134**

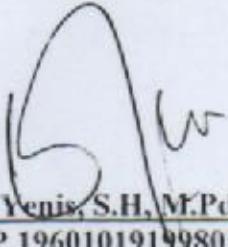
**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018 M /1439 H**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "Legalitas Hasil Mediasi dalam Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)". Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian yang disusun oleh Ahmad Alefza, NIM.1313010134 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Padang, 12 Februari 2018

Pembimbing I



M. Yenis, S.H., M.Pd., M.H  
NIP.196010191998031001

Pembimbing II



Nurhasnah, M.Ag  
NIP. 197207071997032002

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Legalitas Hasil Mediasi dalam Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg**", yang disusun oleh **Ahmad Alefza NIM 1313010134** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

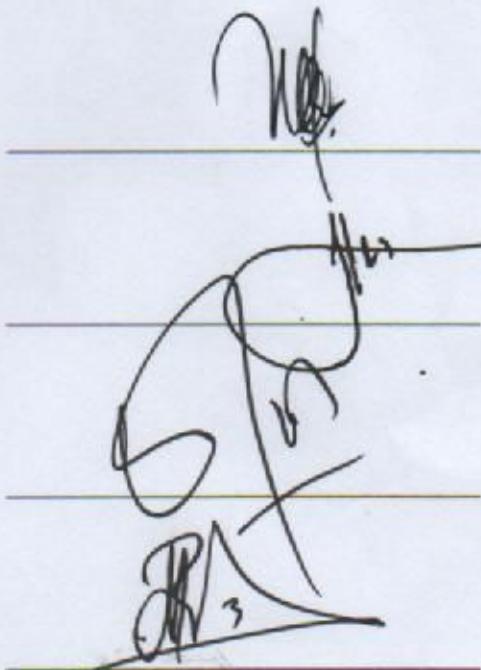
Disahkan di : Padang  
Tanggal : 2 Maret 2018  
TIM Penguji Sidang Munaqasyah

**Alfadli, M.Ag**  
NIP: 19721213 199803 1 001  
Penguji I

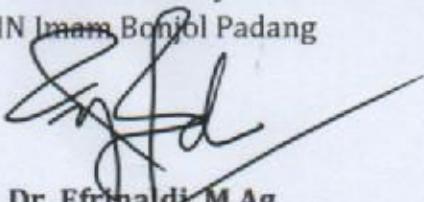
**Zulfan, SHI., MH**  
NIP: 19791019 200710 1 002  
Penguji II

**M. Yenis, S.H, M.Pd, M.H**  
NIP: 19601019 199803 1 001  
Penguji III / Pembimbing I

**Nurhasnah, M.Ag**  
NIP. 19720707 199703 2 002  
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang

  
**Dr. Efrinaldi, M.Ag.**  
NIP19740719 199803 1 001

### **HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 14 Februari 2018



**Ahmad Alefza  
NIM: 1313010134**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Alefza  
Nim : 1313010134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Legalitas Hasil Mediasi dalam Putusan Pengadilan  
Skripsi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang  
Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan Pengadilan Agama  
Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Februari 2018



Ahmad Alefza  
1313010134

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**Legalitas Hasil Mediasi dalam Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)".**" ditulis oleh **Ahmad Alefza NIM: 1313010134**. Adapun Latar belakang skripsi ini adalah mediasi merupakan upaya damai yang dilakukan dengan bantuan mediator kepada para pihak yang berperkara. Mediasi terjadi karena adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat ke pengadilan. Namun di Pengadilan Agama Padang Panjang terjadi mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan yang menghasilkan kesepakatan damai. Pengadilan Agama Padang Panjang menguatkan hasil kesepakatan damai dalam mediasi di luar posita dan petitum surat gugatan tersebut. Sementara hakim PTA Padang berpendapat, kesepakatan damai dalam mediasi di luar posita dan petitum surat gugatan itu adalah cacat hukum karena hakim memutus perkara terhadap yang tidak diminta (*ultra petitum partium*) sehingga membatalkan putusan tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas hasil mediasi di luar dari posita dan petitum dalam putusan pengadilan oleh hakim PA Padang Panjang dan PTA Padang. Pertanyaan penelitiannya adalah apa dasar pertimbangan hakim PA Padang Panjang dan hakim PTA Padang, bagaimana tinjauan hukum terhadap legalitas mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Menjawab persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik Analisis atau Pengolahan Data bahan yang digunakan adalah analisis secara *Content Analysis* (kajian isi). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu putusan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PP dan perkara Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. Sedangkan sumber data sekundernya adalah wawancara dengan hakim, bahan perpustakaan yang terkait, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang terkait dengan penelitian ini. Temuan penelitian dalam studi ini, *pertama*, majelis hakim Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan dasar hukum KUH-Perdata Pasal 1338 untuk mengesahkan kesepakatan damai yang terjadi dalam mediasi di luar dari posita dan petitum surat gugatan. *Kedua*, Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan KUH-Perdata Pasal 1337 untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Padang Panjang. *Ketiga*, mediasi di luar dari posita dan petitum yang menghasilkan kesepakatan damai itu sah/legal untuk dilakukan, namun setelah itu para pihak harus meminta kepada majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan damai itu dalam amar putusannya dengan melakukan perbaikan surat gugatan. jika para pihak tidak memperbaiki surat gugatannya maka majelis hakim tidak boleh menguatkan kesepakatan damai itu, karena mengakibatkan putusannya menjadi cacat hukum dan *ultra petitum partium*. *Ultra petitum partium* itu dilarang dilakukan.

Kata kunci: Legalitas Hasil Mediasi di Luar Posita Petitum

## ABSTRACT

This thesis titled: "**Legality of Mediation Result in Court Decision (Analysis Decision of Padang Panjang Religious Court No. 0151 / Pdt.G / 2015 / PA.PP and Padang High Court of Religion No. 0006 / Pdt.G / 2016 / PTA.Pdg)**". written by **Ahmad Alefza NIM: 1313010134**. The background of this thesis is mediation is a peaceful effort made with the help of mediators to the litigants. Mediation occurred because of a lawsuit committed by the plaintiff. But in Padang Panjang Religious Court there was a mediation outside of posita and petitum lawsuit that resulted a peace agreement. Padang Panjang Religious Court confirm the result of a peace agreement in mediation outside of posita and petitum lawsuit. Meanwhile the judge of Padang High Court of Religion believes that a peace agreement in mediation outside of posita and petitum lawsuit is legal defect because the judge decides the case unsolicited (*ultra petitum partium*) therefore revoke the decision. The formulation of the problem is how the legality of mediation outside from posita and petitum in court decision by judge Padang Panjang Religious Court and Padang High Court of Religion. The research question is what is the basic consideration of judges Padang Panjang Religious Court and judges Padang High Court of Religion, how the legal review of the legality mediation conducted by Padang Panjang Religious Court. Answering the problem above, the author uses the type of library research. Technique of Analysis or Processing The data used is analysis by Content Analysis (content study). This research uses primary data source and secondary data source. Primary data source is the decision of case Number 0151 / Pdt.G / 2015 / PA.PP and case Number 0006 / Pdt.G / 2016 / PTA.Pdg. The secondary data sources are interviews with judges, related library materials, legislation and other references related to this research. This research founding, *First*, the judges of Padang Panjang Religious Courts use the legal basis of the Civil Code Article 1338 to ratify the peace agreement that occurs in the mediation outside of the posita and petitum lawsuit. *Second*, Padang High Court of Religion uses the Civil Code Article 1337 to revoke the decision of the Padang Panjang Religious Court. *Third*, the outside mediation of posita and petitum resulting in a peace agreement is legal, but after that the parties must ask the panel of judges to reinforce the peace agreement in their decision by revising the lawsuit. If the parties do not revise their lawsuit then the judges should not reinforce the peace agreement, because it resulted in the decision being legal defect and *ultra petitum partium*. *Ultra petitum partium* is prohibited.

Keyword: Legality of Mediation Outside of Posita and Petitum